



**KABUPATEN  
TOBA**

**20  
24**

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

## TAHUN ANGGARAN 2023

# SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



satpolpptoba\_perda



Satpolpptoba perda



satpolpp.tobakab  
.go.id



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas lindungan dan berkat Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2023 dapat disusun dan diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun 2023 menjelaskan tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Bupati Toba Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2023 akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan capaian kinerja tahun 2024. Kami sangat mengharapkan masukan dan saran sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba.

Balige, Februari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TOBA

**HARIANTO H. BUTARBUTAR, S.E., M.Si**  
**NIP. 19780118 200502 1 001**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.    Gambaran Umum Instasi .....	1
B.    Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
C.    Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana .....	4
D.    Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ).....	8
E.    Sistematika Penyajian Laporan kinerja .....	10
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	12
A.    Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah .....	12
1.    Visi dan Misi .....	13
2.    Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan .....	14
B.    Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	18
C.    Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	19
D.    Rencana Anggaran.....	20
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA .....	22
A.    Capaian IKU Tahun 2023 .....	23
B.    Capaian Kinerja Sasaran.....	23
C.    Realisasi Anggaran.....	67
BAB 4    PENUTUP.....	74
LAMP I R A N .....	76



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba	.3
Gambar 1. 2 Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin	.....5

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pegawai Satpol PP Kab. Toba Berdasarkan Tingkat Pendidikan	.....6
Tabel 1. 2 Pegawai Satpol PP Kab. Toba Berdasarkan Tingkat Golongan	.....6
Tabel 1. 3 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana	.....7
Tabel 2. 1 Matriks Hubungan Antara Tujuan, Sasaran dan IKU	.....13
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	.....19
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	.....20
Tabel 2. 4 Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Toba Tahun 2023	.....20
Tabel 2. 5 Alokasi Anggaran Per-Program	.....21
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	.....22
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023	.....23
Tabel 3. 3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi	.....24
Tabel 3. 4 Data Pengaduan Gangguan Trantibum	.....25
Tabel 3. 5 Perbandingan Antara Target dan Realisasi	.....32
Tabel 3.6 Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	.....32
Tabel 3. 7 Perbandingan Antara Target dan Realisasi	.....34
Tabel 3. 8 Data Trantibum Kabupaten Toba Tahun 2023	.....34
Tabel 3. 9 Perbandingan Antara Target dan Realisasi	.....40
Tabel 3. 10 Realisasi Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	..41
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja 4 (empat) Tahun Terakhir	.....42
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja 2023, Jangka Menengah dan Nasional	.....44
Tabel 3. 13 Perbandingan Antara Target dan Realisasi	.....54
Tabel 3.14 Data Kejadian Kebakaran se-Kabupaten Toba	.....55
Tabel 3.15 Perbandingan Antara Target dan Realisasi	.....58
Tabel 3. 16 Data Pelayanan Kejadian Kebakaran dengan Waktu Tanggap ( <i>Response Time Rate</i> )	.....58
Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja	.....61
Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja 2023,	.....62
Tabel 3. 19 Realisasi Anggaran Per Sasaran	.....68
Tabel 4. 1 Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja	.....74



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Instansi

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan pada pasal 255 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pada pasal 256 dan pasal 257 Undang-Undang 23 tahun 2014 juga menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki jabatan fungsional serta dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggar Perda.

Pemerintah Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dijelaskan pada pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;  
dan
- f. Sosial.

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib sub urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maka Pemerintah Daerah Kabupaten Toba membentuk Satuan Polisi Pamong Praja melalui Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016



tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir pada pasal 2 ayat 5 yang menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran.

## **B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **1. Struktur Organisasi**

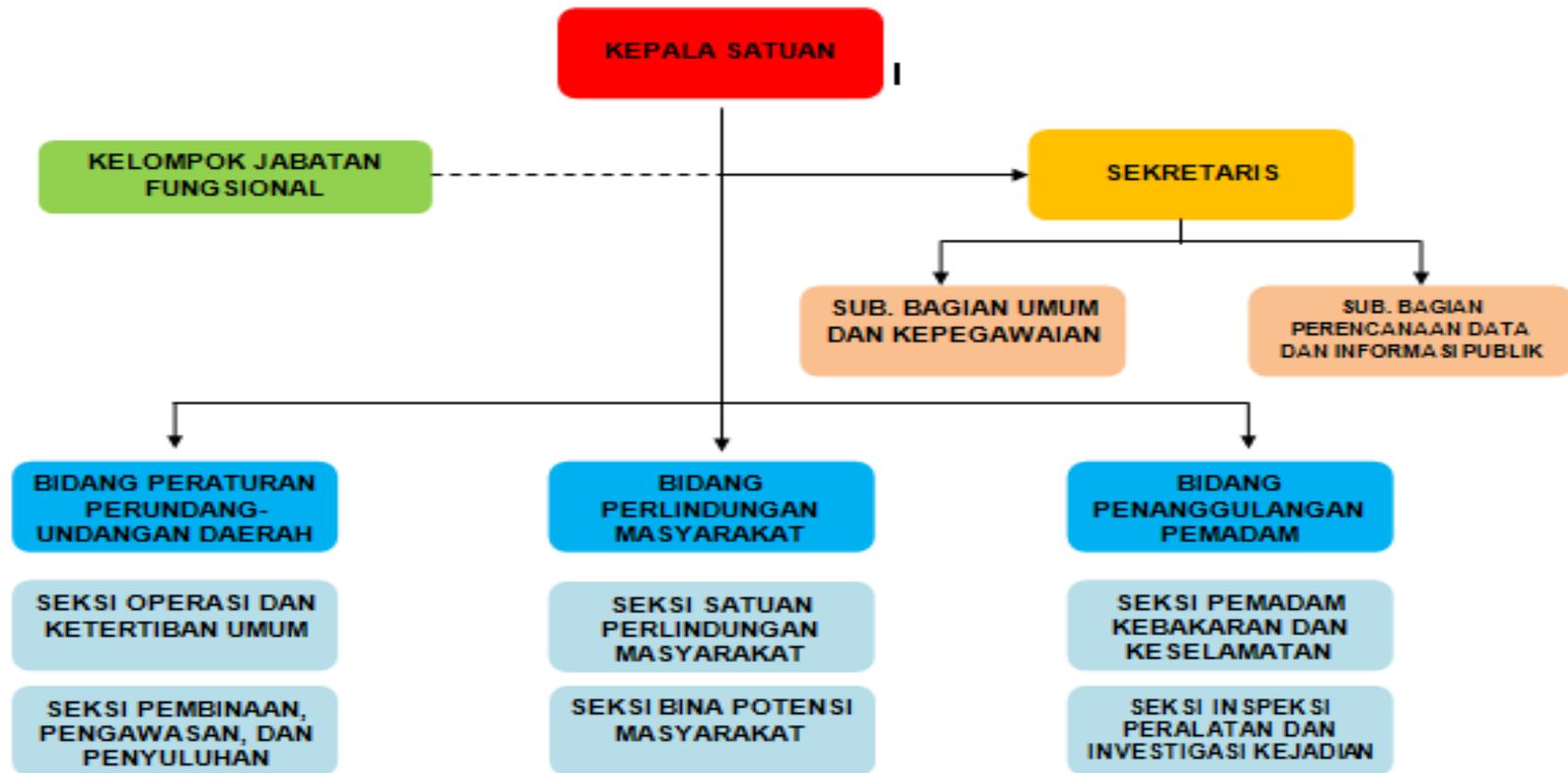
Kedudukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dijabarkan dalam Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Sekretaris, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi Publik.
- b. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, membawahi :
  - 1) Seksi Operasi dan Ketertiban Umum;
  - 2) Seksi Penyuluhan, Pengawasan, dan Pembinaan.
- c. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
  - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- d. Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan, membawahi :
  - 1) Seksi Pemadam Kebakaran;
  - 2) Seksi Inspeksi Peralatan dan Investigasi Kejadian.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba yang dalam pelaksanaan tugasnya dijelaskan dalam struktur organisasi sebagai berikut :



### Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba



## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dijelaskan dalam pasal 18 Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran. Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba menyelenggarakan fungsi :

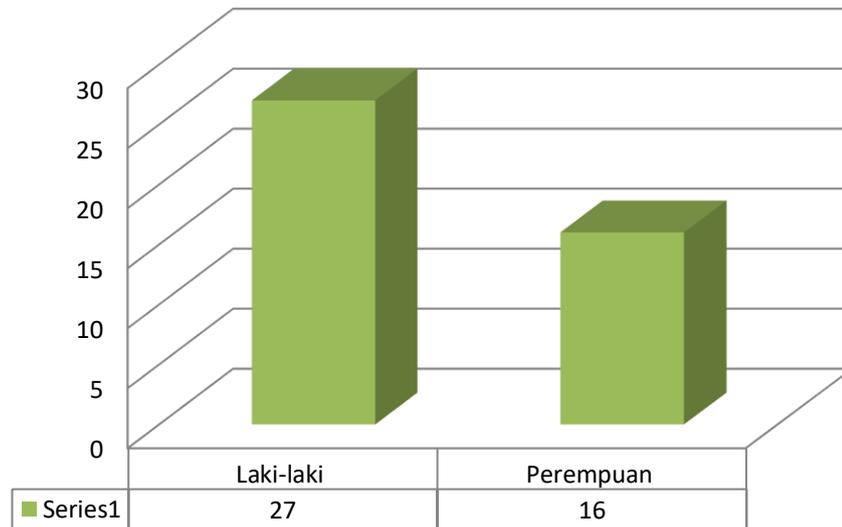
- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
- d. Pelaksanaan administratif satuan polisi pamong praja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

#### 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Aparatur Negeri Sipil (ASN) di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 43 orang yang terdiri dari 27 laki-laki dan 16

perempuan. Perbandingan jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba berdasarkan gender dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. 2 Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin

Apabila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja maka jumlah personil ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba tahun 2023 belum optimal. Jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba idealnya sebanyak 251-350 orang. Dalam menyikapi hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba memberdayakan jasa tenaga Banpol PP sebanyak 138 orang. Dengan demikian, jumlah keseluruhan personil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba sebanyak 181 orang (ASN dan Non ASN/Banpol PP). Namun jumlah tersebut masih belum sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja.



## 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keadaan pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. 1 Pegawai Satpol PP Kab. Toba Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Doktor	-
2	Magister	4
3	Sarjana	16
4	Diploma	1
5	SLTA	22
6	SLTP	-
7	SD	-
	Total	43

Tabel 1. 2 Pegawai Satpol PP Kab. Toba Berdasarkan Tingkat Golongan

No.	Tingkat Golongan	Jumlah
1.	IV/b	1
2.	IV/a	5
3.	III/d	4
4.	III/c	-
5.	III/b	3
6.	III/a	7
7.	II/d	2
8.	II/c	2
9.	II/b	-
10.	II/a	19
	Total	43

## 3. Sarana Prasarana

Selain dukungan Sumber Daya Manusia, Satuan Polisi Pamong Praja juga perlu didukung oleh sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Aset serta sarana prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba antara lain :



- a. Gedung dan bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Toba yang berada di Jalan Dr. Sutomo No. 15, Kelurahan Sangkar Nihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Gedung kantor ini meliputi ruang Kepala Satuan, ruang sekretaris, ruang bagian umum dan kepegawaian, ruang bagian perencanaan data dan informasi publik, ruang bendahara, ruang bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ruang bidang perlindungan masyarakat, ruang bidang penanggulangan pemadam kebakaran dan keselamatan, ruang petugas tindak internal, pos jaga, ruang rapat, hanggar pemadam kebakaran, garasi, dapur, toilet, aula.
- b. Sarana prasarana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Ketersediaan sarana prasarana minimal di Satuan Polisi Pamong Praja dirincikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 3 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana	Uraian		Keterangan
	Volume	Satuan	
Gedung Kantor			
- Ruang kerja	8	unit	Baik
- Ruang pos jaga	5	Unit	Baik
- Ruang rapat	1	unit	Baik
Mobil patroli	1	Unit	Rusak sedang
Mobil dalmas	1	Unit	Rusak ringan
Sepeda motor	4	Unit	Baik
Sepeda gunung	10	Unit	Baik
Peralatan dalmas			



- Tameng	20	Set	Baik
- Sepatu bot	20	Set	Baik
- Pentungan	20	Set	Baik
Bangunan damkar			
- Pos damkar	3	Unit	Baik
Sarana damkar			
- Mobil pompa pengangkut air dan foam beserta kelengkapannya	6	Unit	Baik
- Pompa robin	2	Buah	Baik
- Nozel	18	Buah	Baik
- Selang uk. 1,5 inc	6	Buah	Baik
- Selang uk. 2,5 inc	16	Buah	Baik
- Jaket tahan panas	20	Set	Baik

c. Jaringan listrik, internet dan air.

#### **D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)**

Terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran di tahun 2023 sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk memperhatikan dan mematuhi persyaratan yang telah ditentukan sebelum mendirikan bangunan sehingga masih banyak masyarakat yang mendirikan bangunan tanpa memperhatikan kondisi lingkungan serta tidak memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Pada tahun 2023 banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi tertentu yang tentunya banyak menggunakan reklame atau spanduk sebagai unsur promosi dan informasi sehingga perlu dilakukan penertiban pada reklame maupun spanduk yang sudah terlewat dari batas waktu berlakunya agar tidak mengganggu estetika kota, persaingan usaha dan keselamatan umum masyarakat.



3. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum cenderung masih terjadi seperti para pedagang yang berjualan tidak pada lokasi yang ditetapkan pada saat kegiatan pasar mingguan (onan), anak sekolah yang bolos pada saat jam pelajaran berlangsung, serta masalah sosial lainnya dimasyarakat yang mampu mengganggu trantibum.
4. Pemerintah Kabupaten Toba bersama dengan *stakeholder* menyelenggarakan *Event Powerboat (F1H2O)* di kawasan Danau Toba Kecamatan Balige sehingga perlu perhatian khusus bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban di sekitar kawasan tersebut mulai dari tahap pembangunan lokasi pertandingan, penataan para pedagang di sekitar lokasi, sampai dengan selesai terselenggaranya kegiatan tersebut.
5. Belum adanya anggota pemadam kebakaran yang bersertifikat pemadam kebakaran dan penyelamatan.
6. Pembentukan pos sektor damkar di Kecamatan Ajibata untuk meningkatkan waktu tanggap (*response time*) 15 menit dalam pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
7. Belum terbentuknya anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di tingkat desa/kelurahan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba sebagai instansi yang bertugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penanggulangan pemadam kebakaran akan berupaya meningkatkan perannya dalam mengantisipasi dan mengatasi isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Penanganan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah akan menjadi fokus utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dalam pelaksanaan tugas kedepan.



Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan yang akan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba lakukan untuk meningkatkan kinerjanya yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan aparat keamanan lainnya agar penanganan dari setiap masalah dapat terselesaikan dengan baik dan tuntas.
2. Meningkatkan kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba agar memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugas.
3. Kegiatan patroli yang rutin dilakukan di wilayah yang rawan terjadi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Pelaksanaan tugas dilapangan akan lebih mengedepankan pola pendekatan, bimbingan, pembinaan dan penyuluhan agar setiap program/kebijakan pemerintah dapat disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat membantu untuk mendukung program tersebut.

#### **E. Sistematika Penyajian Laporan kinerja**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten toba tahun 2023 sebagai berikut :

##### ***Bab I. Pendahuluan***

Menjelaskan secara ringkas tentang gambaran umum instansi, sistematika penyajian, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, potensi sumber daya manusia, dan isu strategis yang dihadapi oleh OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba.

##### ***Bab II. Perencanaan Kinerja***

Memuat tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023.



### ***Bab III. Akuntabilitas Kinerja***

Berisi penjelasan singkat tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Serta menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### ***Bab IV. Penutup***

Memuat tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



## BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah langkah awal dalam pengambilan keputusan tentang tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Dalam perencanaan kinerja juga memuat target yang harus dicapai dalam setiap program/kegiatan tahun 2023.

### A. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Toba untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dalam menyusun Rencana Kerja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana Strategis menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Daerah dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Komponen rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba terdiri dari 1 (satu) tujuan, dan 3 (tiga) program yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari 2 (dua) program yang menjadi program utama yang berisi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta melaksanakan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Sedangkan 1 (satu) program lainnya merupakan program penunjang yang sifatnya berkaitan dengan kegiatan rutin kantor.



Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian Misi ke-7 (empat) Bupati Toba yaitu “Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban”, maka perlu ditetapkan tujuan yang memuat tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba merumuskan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Matriks Hubungan Antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya keamanan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
		Meningkatnya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Waktu tanggap ( <i>response time</i> ) penanganan kebakaran

## 1. Visi dan Misi

### a. Visi

Visi merupakan sebuah rumusan umum dari keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba yaitu :

**“ Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar”**



b. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba yaitu :

**“ Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban ”**

2. Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan

a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahan permasalahan, dan menangani isu strategis.

**“ Terwujudnya keamanan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran ”**

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba adalah :

- 1) Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum
- 2) Meningkatnya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

c. Strategi

Strategi yang akan dijalankan berdasarkan permasalahan dan kewenangan yaitu :

- 1) Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum



- 2) Melaksanakan rekrutmen, pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat
- 3) Meningkatkan sarana prasarana dan SDM pemadam kebakaran

*d. Arah kebijakan*

Kebijakan yang akan ditempuh dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain :

- 1) Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada
- 2) Penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati
- 3) Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota
- 4) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
- 5) Pembinaan aparatur pemadam kebakaran
- 6) Optimalisasi pos jaga yang sudah ada
- 7) Pengadaan sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas.

*e. Program*

Program yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut yaitu :



No.	Program
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2.	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
3.	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

*f. Kegiatan*

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2023 adalah :

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
		Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
		Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
			Penyediaan peralatan rumah tangga
			Penyediaan barang cetak dan penggandaan
			Fasilitasi kunjungan tamu
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA

			perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
2.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
			Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum
			Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
		Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota
			Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan kapasitas dan karir PPNS
3.	Program pencegahan, penanggulangan,	Pencegahan, pengendalian, pemadaman,	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam



	penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	daerah kabupaten/kota
			Pembinaan aparatur pemadam kebakaran
		Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba merupakan perjanjian kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja juga merupakan pemberian tugas dan tanggung jawab antara atasan dengan bawahan (*Lampiran 1*).

Sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	88%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	29%
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	88%
		Cakupan kinerja penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%
2.	Meningkatnya Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) penanganan kebakaran	20 Menit
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%

### C. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Karena adanya ketidaksesuaian target capaian tahun anggaran 2023 pada Renstra dan RPJMD maka pada pelaporan ini kami melakukan penyesuaian target capaian pada IKU menjadi 100% sesuai dengan RPJMD pada indikator tujuan "Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan". Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Satuan Indikator	Target Capaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	86	100	100	100	100
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	98	100	100	100	100
Meningkatnya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	20	20	15	15	15

#### D. Rencana Anggaran

Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun 2023 sebelum perubahan sebesar Rp. 10.048.251.796,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 10.018.191.886,- dan belanja modal sebesar Rp. 30.059.910,-. Sesudah perubahan anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba menjadi Rp. 12.289.447.545,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 2.316.807.939 dan belanja modal sebesar Rp. 24.387.810,- dengan penambahan anggaran sebesar Rp. 2.341.195.749,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 2.316.807.939,- dan belanja modal sebesar Rp. 24.387.810,- seperti tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 4 Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Toba Tahun 2023

No.	Uraian	Pagu Indikatif (Rp)		Perubahan (penambahan)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1.	Belanja Operasi	10.018.191.886	12.334.999.825	2.316.807.939
2.	Belanja Modal	30.059.910	54.447.720	24.387.810
	<b>Jumlah</b>	<b>10.048.251.796</b>	<b>12.389.447.545</b>	<b>2.341.195.749</b>

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mendukung capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba adalah sebagai berikut :



Tabel 2. 5 Alokasi Anggaran Per-Program

No.	Program	Jumlah Anggaran	
		APBD	APBD
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.697.862.753	5.994.282.107
2.	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.979.782.495	6.015.258.890
3.	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	370.606.548	379.906.548
	<b>Jumlah</b>	<b>10.048.251.796</b>	<b>12.389.447.545</b>

### BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi misi instansi pemerintah terkhusus pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba.

Dalam pembuatan pertanggungjawaban terhadap jalannya manajemen organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba perlu dilakukan pengukuran kinerja setiap tahunnya. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan antara rencana atau standar yang ditetapkan pada rencana strategis dengan realisasinya sehingga akan diketahui tingkat capaian kinerja setiap program. Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba meliputi capaian kinerja atas indikator utama, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan capaian kinerja setiap kegiatan.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤	Sangat tinggi	■
2	76% ≤ 90%	Tinggi	■
3	66% ≤ 75%	Sedang	■
4	51% ≤ 65%	Rendah	■
5	≤ 50%	Sangat Rendah	■

Sumber Data : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



## A. Capaian IKU Tahun 2023

Dalam mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi maka akan dijelaskan capaian kinerja tujuan dan sasaran rencana strategis yang akan digunakan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba. Pencapaian terhadap IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba secara ringkas dimuat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator	Realisasi Capaian Indikator	Tingkat Capaian
1.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	20 Menit	21,7 Menit	91,15%

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) indikator. Karena adanya ketidaksesuaian target antara Renstra dan RPJMD dimana target yang benar ada pada RPJMD, maka kami telah melakukan penyesuaian target sehingga pada pelaporan ini target pada indikator kinerja “Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan” telah disesuaikan menjadi 100%. Dari tabel di atas terlihat bahwa seluruh indikator kinerja memenuhi capaian kinerja diatas 91% atau kriteria “Sangat Tinggi”.

## B. Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba untuk tahun 2023 pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran Strategis I : Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 2) Sasaran Strategis II : Meningkatnya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Adapun analisis capaian target sasaran strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 1**

**Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum”. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 3 (tiga) indikator kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

**1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

*a. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan*

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan” diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian
1.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%

Karena adanya ketidaksesuaian target antara Renstra dan RPJMD dimana target yang benar ada pada RPJMD, maka



kami telah melakukan penyesuaian target sehingga pada pelaporan ini target pada indikator kinerja “Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan” telah disesuaikan menjadi 100%. Berdasarkan pengukuran pencapaian untuk indikator kinerja “Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan” realisasi capaian kinerjanya yaitu 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini tercapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”.

Tabel 3. 4 Data Pengaduan Gangguan Trantibum

NO.	TANGGAL	JENIS PELANGGARAN/ KEGIATAN	LOKASI	KETERANGAN
1	02-Jan-23	BERJUALAN DI TROTOAR DAN BADAN JALAN	KEC. LAGUBOTI	PENERTIBAN PASAR LAGUBOTI
2	13-Jan-23	PENGHIMBAUAN PEDAGANG UNTUK TIDAK BERJUALAN DI AREA BADAN JALAN	KEC. BALIGE	PENGHIMBAUAN PEDAGANG UNTUK DIRELOKASI SEMENTARA KE DEA SARIBU RAJA JANJI MARIA
3	14-Jan-23	BANGUNAN BERADA DI SEMPADAN DANAU	KEC. BALIGE	PENERTIBAN BANGUNAN DI LOKASI F1H20
4	19-Jan-23	PEDAGANG BERJUALAN TIDAK DILOKASI YANG TELAH DITETAPKAN	KEC. BALIGE	PENGAMANAN DALAM RANGKA PENGUNDIAN NOMOR LAPAK PASAR/ONAN DI TAMPUBOLON
5	30-Jan-23	REKLAME HABIS MASA IZIN BERLAKU	KEC. TAMPAHAN	PENERTIBAN SPANDUK/BALIHO YANG SUDAH KADALUARSA
6	30-Jan-23	REKLAME HABIS MASA IZIN BERLAKU	KEC. BALIGE	PENERTIBAN SPANDUK/BALIHO YANG SUDAH KADALUARSA
7	01-Feb-23	REKLAME HABIS MASA IZIN BERLAKU	KEC. BALIGE	PENERTIBAN SPANDUK/BALIHO YANG SUDAH KADALUARSA
8	01-Feb-23	REKLAME HABIS MASA IZIN BERLAKU	KEC. SIGUMPAR	PENERTIBAN SPANDUK/BALIHO YANG SUDAH KADALUARSA
9	01-Feb-23	REKLAME HABIS MASA IZIN BERLAKU	KEC. SIANTAR NARUMONDA	PENERTIBAN SPANDUK/BALIHO YANG SUDAH KADALUARSA
10	01-Feb-23	REKLAME HABIS MASA IZIN BERLAKU	KEC. PORSEA	PENERTIBAN SPANDUK/BALIHO YANG SUDAH



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA

				KADALUARSA
11	06-Feb-23	REKLAME HABIS MASA IZIN BERLAKU	KEC. PARMAKSIAN	PENERTIBAN SPANDUK/BALIHU YANG SUDAH KADALUARSA
12	08-Feb-23	BERJUALAN DI TROTOAR DAN BADAN JALAN	KEC. BALIGE	PENERTIBAN RUTIN PEDAGANG, PARKIE DAN LALU LINTAS PEKAN PORSEA
13	10-Feb-23	PENEMPATAN KJA/KJT TIDAK SESUAI DENGAN LOKASI YANG TELAH DITETAPKAN	KEC. BALIGE	PENGAMANAN PENERTIBAN KJA/KJT TA 2023
14	10-Feb-23	PEDAGANG BERJUALAN TIDAK DILOKASI YANG TELAH DITETAPKAN	KEC. BALIGE	PENERTIBAN PASAR YANG BERADA DI TERMINAL MINI, BALERONG DAN JANJI MARIA TAMPUBOLON
15	15-Mar-23	MENGELOLA MILIK PEMERINTAH	KEC. PORSEA	PENGAMANAN PENGOSONGAN ASET DI CAFE SOPO MARPIKKIR
16	17-Mar-23	MENUTUP ALIRAN AIR KE WILAYAH PERTANIAN MASYARAKAT	KEC BALIGE	PENGAMANAN PEMBUKAAN IRIGASI YANG DITUTUP OLEH HOTMA NAIBAHO
17	18-Mar-23	MENUTUP ALIRAN AIR KE WILAYAH PERTANIAN MASYARAKAT	KEC BALIGE	PENGAMANAN PEMBUKAAN IRIGASI YANG DITUTUP OLEH HOTMA NAIBAHO
18	30-Mar-23	BERJUALAN DI TROTOAR DAN BADAN JALAN	KEC. BALIGE	PENGAMANAN PASAR TUMPAH BALIGE
19	30-Mar-23	MENGUASAI TANAH YANG BUKAN MILIKNYA	KEC. LAGUBOTI	PENGAMANAN PENOLAKAN PIHAK TANDA HUTAHAEAN TERHADAP PEMAKAMAN S MARPAUNG DI DESA MARTIBUNG
20	31-Mar-23	ADANYA MASYARAKAT YANG MENGANGGU KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, SEPERTI PERJUDIAN, BALAP LIAR DAN AKSI ASUSILA	KEC. BALIGE	RAZIA DALAM RANGKA MENANGGULANGI DAN MENINDAK BERBAGAI BENTUK KEJAHATAN PENYAKIT MASYARAKAT YANG MELIPUTI AKSI PREMANISME, PERJUDIAN,



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA

				PORNOGRAFI, MINUMAN KERAS DAN PROSTITUSI YANG MERESAHKAN MASYARAKAT DI BULAN SUCI RAMADHAN 1444 H DI WILAYAH KAB. TOBA
21	01-Apr-23	ADANYA MASYARAKAT YANG MENGANGGU KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, SEPERTI PERJUDIAN, BALAP LIAR DAN AKSI ASUSILA	KEC. BALIGE	RAZIA DALAM RANGKA MENANGGULANGI DAN MENINDAK BERBAGAI BENTUK KEJAHATAN PENYAKIT MASYARAKAT YANG MELIPUTI AKSI PREMANISME, PERJUDIAN, PORNOGRAFI, MINUMAN KERAS DAN PROSTITUSI YANG MERESAHKAN MASYARAKAT DI BULAN SUCI RAMADHAN 1444 H DI WILAYAH KAB. TOBA
22	15 S/D 16 APRIL	BERJUALAN DI TROTOAR DAN BADAN JALAN	KEC. BALIGE	PENERTIBAN PASAR TUMPAH BALIGE
23	22-Apr-23	BERJUALAN DI TROTOAR DAN BADAN JALAN	KEC. SIGUMPAR	PENERTIBAN PASAR SIGUMPAR
24	23-Apr-23	BERJUALAN DI TROTOAR DAN BADAN JALAN	KEC. SIGUMPAR	PENERTIBAN PASAR SIGUMPAR
25	22-Mei-23	BERJUALAN DI TROTOAR DAN BADAN JALAN	KEC. BALIGE	PENERTIBAN PASAR LAGUBOTI
26	26-Mei-23	REKLAME HABIS MASA IZIN BERLAKU	KEC. TAMPAHAN	PENERTIBAN IZIN REKLAME
27	26-Mei-23	REKLAME HABIS MASA IZIN BERLAKU	KEC. BALIGE	PENERTIBAN IZIN REKLAME
28	26-Mei-23	REKLAME HABIS MASA IZIN BERLAKU	KEC. LAGUBOTI	PENERTIBAN IZIN REKLAME
29	10-Jun-23	ADANYA PENCURIAN DAN BALAP LIAR	KEC. BALIGE	GIAT PATROLI GABUNGAN TNI- POLRI SECARA SERENTAK DENGAN SASARAN TINDAK PIDANA 3C ( CURAT, CURAS DAN CURANMOR)



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA

				AKSI PREMANISME
30	17-Jun-23	ADANYA PENCURIAN DAN BALAP LIAR	KEC. BALIGE	GIAT PATROLI GABUNGAN TNI- POLRI SECARA SERENTAK DENGAN SASARAN TINDAK PIDANA 3C ( CURAT, CURAS DAN CURANMOR) AKSI PREMANISME
31	24-Jun-23	ADANYA PENCURIAN DAN BALAP LIAR	KEC. BALIGE	GIAT PATROLI GABUNGAN TNI- POLRI SECARA SERENTAK DENGAN SASARAN TINDAK PIDANA 3C ( CURAT, CURAS DAN CURANMOR) AKSI PREMANISME
32	01-Jul-23	ADANYA PENCURIAN DAN BALAP LIAR	KEC. BALIGE	GIAT PATROLI GABUNGAN TNI- POLRI SECARA SERENTAK DENGAN SASARAN TINDAK PIDANA 3C ( CURAT, CURAS DAN CURANMOR) AKSI PREMANISME
33	04-Jul-23	SISWA BOLOS DI JAM SEKOLAH	KEC. BALIGE	RAZIA ANAK SEKOLAH
34	06 Juli 2023	SISWA BOLOS DI JAM SEKOLAH	KEC. BALIGE	RAZIA ANAK SEKOLAH
35	08 Juli 2023	ADANYA PENCURIAN DAN BALAP LIAR	KEC. BALIGE	GIAT PATROLI GABUNGAN TNI- POLRI SECARA SERENTAK DENGAN SASARAN TINDAK PIDANA 3C ( CURAT, CURAS DAN CURANMOR) AKSI PREMANISME
36	11 Juli 2023	BANGUNAN TANPA IMB	KEC. ULUAN	PENGAMANAN MEDIASI ANTARA SDR JEFRI BUTARBUTAR DENGAN KEPALA DESA SIGAOL BARAT



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA

37	10 Juli 2023	MENGUASAI TANAH MILIK PEMERINTAH	KEC. SILAEN	PENGAMANAN SOMASI ATAS PEMBANGUNAN SEBUAH RUMAH DIATAS TANAH PEMKAB TOBA SDR TOGAR NAPITUPULU YANG TERLETAK DILOKASI SD173567 SIRANDOS
38	13 Juli 2023	BANGUNAN TANPA IMB	KEC. BALIGE	PENINJAUAN BANGUNAN TANPA IMB
39	18 Juli 2023	GALIAN TANPA IZIN	KEC. HABINSARAN	PENINJAUAN GALIAN DAN MEDIASI WARGA DESA LUMBAN RUHAP
40	26 Juli 2023	BANGUNAN TANPA IMB	KEC. PARMAKSIAN	PENINJAUAN BANGUNAN TANPA IMB
41	02 Agustus 2023	GALIAN TANPA IZIN	KEC. PINTU POHAN MERANTI	PENINJAUAN LEGALITAS DAN EMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
42	14 Agustus 2023	GALIAN TANPA IZIN	KEC. LUMBAN JULU	PENINJAUAN LAPANGAN TERKAIT GALIAN C YANG BERIZIN DAN TIDAK BERIZIN
43	15 Agustus 2023	BANGUNAN TANPA IMB	KEC BALIGE	PENINJAUAN BANGUNAN TANPA IMB
44	19 Agustus 2023	ADANYA PENCURIAN DAN BALAP LIAR	KEC. BALIGE	KEGIATAN RUTIN YANG DITINGKATKAN DALAM RANGKA OPS KANCIL TOBA 2023 TENTANG PENINDAKAN TERHADAP PENCURIAN DAN PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH KAB. TOBA
45	21 Agustus 2023	GALIAN TANPA IZIN	KEC. BALIGE	PENINJAUAN LAPANGAN TERKAIT GALIAN C YANG BERIZIN DAN TIDAK BERIZIN
46	21 Agustus 2023	GALIAN TANPA IZIN	KEC. LAGUBOTI	PENINJAUAN LAPANGAN TERKAIT GALIAN C YANG BERIZIN DAN TIDAK BERIZIN



47	11 Agustus 2023	BANGUNAN TANPA IMB	KEC. PARMAKSIAN	MEDIASI SENGKETA BANGUNAN TANPAIMB ANTARA OBEN SITORUS DAN WILSON SITORUS
48	15-Sep-23	BANGUNAN TANPA IMB	KEC. BALIGE	PENINJAUAN LAPANGAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN BANGUNAN TANPA IMB
49	15-Nov-23	ALIRAN AIR DITUTUP KE WILAYAH PERTANIAN MASYARAKAT	KEC. BALIGE	MEDIASI KONFLIK MASYARAKAT DENGAN HOTMA NAIBAHO TENTANG PENUTUPAN IRIGASI PEATALUN
50	04 Desember 2023	BANGUNAN TANPA IMB	KEC. BALIGE	KUNJUNGAN LAPANGAN TERHADAP 3 (TIGA) OBJEK BANGUNAN YANG TERINDIKASI MELAKUKAN PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG DIDANAU TOBA

Sumber Data : Data dan Informasi Satpol PP Kab. Toba

Dari data di atas diperoleh perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah target pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} &= \frac{50 \text{ kasus}}{50 \text{ kasus}} \times 100 \% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} &= \frac{100\%}{100\%} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$



Pada tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba menerima laporan gangguan trantibum sebanyak 50 kasus dan mampu diselesaikan seluruhnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba sehingga realisasi kinerja pada indikator ini sebesar 100% dan kinerja dapat tercapai sebesar 100%.

Indeks ketenteraman dan ketertiban umum tahun 2022 dan tahun 2023 dapat diperoleh dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio tindak kriminal} &= \frac{\text{Jumlah tindak kriminal}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\% \\ \text{terhadap jumlah} & \\ \text{penduduk tahun} & \\ \text{2022} & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{342 \text{ kasus}}{213499 \text{ jiwa}} \times 100\% \\ &= 0,16\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio tindak kriminal} &= \frac{\text{Jumlah tindak kriminal}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\% \\ \text{terhadap jumlah} & \\ \text{penduduk tahun} & \\ \text{2023} & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{573 \text{ kasus}}{212133 \text{ jiwa}} \times 100\% \\ &= 0,27\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Indeks ketenteraman} &= \text{rasio perda yang ditegakan} - \text{rasio} \\ \text{dan ketertiban tahun} & \text{tindak kriminal terhadap jumlah} \\ \text{2022} & \text{penduduk} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 44,44\% - 0,16\% \\ &= 44,28\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Indeks ketenteraman} &= \text{rasio perda yang ditegakan} - \text{rasio} \\ \text{dan ketertiban tahun} & \text{tindak kriminal terhadap jumlah} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 2023 & \text{ penduduk} \\ & = 100\% - 0,27\% \\ & = 99,73\% \end{aligned}$$

*b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan*

Perbandingan antara target dan realisasi dari indikator kinerja “Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 5 Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian
1.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%

Berdasarkan pengukuran pencapaian indikator kinerja “Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan” dengan realisasi kinerja yaitu 100% atau tercapai dengan kriteria “Sangat tinggi”.

Tabel 3.6 Jumlah Keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi

No	Tentang	Keterangan
1	Peraturan Daerah Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah	Sosialisasi Perda dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba
2	Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retrebusi Pelayanan Kesehatan	Pengawasan pelaksanaan kesehatan bergerak
3	Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retrebusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Toba
4	Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 tahun 2012 Tentang Retrebusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Melakukan razia bersama dengan Dinas Perhubungan Kab. Toba serta TNI-Polri
5	Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retrebusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran
6	Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retrebusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Melakukan pendataan tower yang ada di Kab. Toba
7	Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retrebusi Terminal	Melakukan koordinasi bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Toba



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA

8	Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retrebusi Rumah Potong Hewan	Melakukan peninjauan lokasi bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba
9	Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retrebusi Pelayanan Kepelabuhan	Mendampingi Dinas Perhubungan Kabupaten Toba dalam pengutipan biaya retribusi pelayanan ke pelabuhan
10	Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retrebusi Tempat Kreasi Dan Olah Raga	Melakukan pendataan lokasi bersama dengan dinas terkait
11	Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retrebusi Izin Tempat Penjualan Minuan Beralkohol	Melakukan razia bersama dengan TNI-Polri
12	Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retrebusi Izin Trayek	Melakukan koordinasi bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Toba
13	Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Retrebusi Izin Usahan Perikanan	Melakukan penertiban Keramba Jaring Apung (KJA)
14	Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Melakukan penertiban PKL, anak sekolah yang bolos (Operasi Kasih Sayang), dan ODGJ
15	Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	Melakukan kegiatan sosialisasi bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Toba
16	Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2010 Tentang IMB	Penertiban dan monitoring bangunan yang tidak memiliki IMB
17	Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame	Penertiban baliho tanpa izin dan yang sudah selesai masa berlakunya

Sumber Data: Data dan Informasi Satpol PP Kab. Toba

Dari data di atas diperoleh perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Perda Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda Perkada yang memuat sanksi}} \times 100 \%$$

$$= \frac{17 \text{ Perda/Perkada}}{17 \text{ Perda/Perkada}} \times 100 \%$$

$$= 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100 \%$$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$



Pada tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba menegakkan sebanyak 7 Perda/Perkada yang memuat sanksi dari total keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi. Namun demikian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan keseluruhan Perda dan Perkada di Kabupaten Toba.

*c. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)*

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)” dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 7 Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian
1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	100%	100%

Karena adanya ketidaksesuaian target antara Renstra dan RPJMD dimana target yang benar ada pada RPJMD, maka kami telah melakukan penyesuaian target sehingga pada pelaporan ini target pada indikator kinerja “Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)” telah disesuaikan menjadi 100%. Berdasarkan pengukuran pencapaian indikator kinerja “Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)” dengan realisasi capaian kinerja yaitu 100% atau tercapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”.

Tabel 3. 8 Data Trantibum Kabupaten Toba Tahun 2023

NO.	TANGGAL	JENIS PELANGGARAN/ KEGIATAN	LOKASI	KETERANGAN
1	02-Jan-23	BERJUALAN DI TROTOAR DAN BADAN JALAN	KEC. LAGUBOTI	PENERTIBAN PASAR LAGUBOTI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA

2	13-Jan-23	PENGHIMBAUAN PEDAGANG UNTUK TIDAK BERJUALAN DI AREA BADAN JALAN	KEC. BALIGE	PENGHIMBAUAN PEDAGANG UNTUK DIRELOKASI SEMENTARA KE DEA SARIBU RAJA JANJI MARIA
3	14-Jan-23	BANGUNAN BERADA DI SEMPADAN DANAU	KEC. BALIGE	PENERTIBAN BANGUNAN DI LOKASI F1H20
4	19-Jan-23	PEDAGANG BERJUALAN TIDAK DILOKASI YANG TELAH DITETAPKAN	KEC. BALIGE	PENGAMANAN DALAM RANGKA PENGUNDIAN NOMOR LAPAK PASAR/ONAN DI TAMPUBOLON
5	30-Jan-23	REKLAME HABIS MASA IZIN BERLAKU	KEC. TAMPAHAN	PENERTIBAN SPANDUK/BALIHO YANG SUDAH KADALUARSA
6	30-Jan-23	REKLAME HABIS MASA IZIN BERLAKU	KEC. BALIGE	PENERTIBAN SPANDUK/BALIHO YANG SUDAH KADALUARSA
7	01-Feb-23	REKLAME HABIS MASA IZIN BERLAKU	KEC. BALIGE	PENERTIBAN SPANDUK/BALIHO YANG SUDAH KADALUARSA
8	01-Feb-23	REKLAME HABIS MASA IZIN BERLAKU	KEC. SIGUMPAR	PENERTIBAN SPANDUK/BALIHO YANG SUDAH KADALUARSA
9	01-Feb-23	REKLAME HABIS MASA IZIN BERLAKU	KEC. SIANTAR NARUMONDA	PENERTIBAN SPANDUK/BALIHO YANG SUDAH KADALUARSA
10	01-Feb-23	REKLAME HABIS MASA IZIN BERLAKU	KEC. PORSEA	PENERTIBAN SPANDUK/BALIHO YANG SUDAH KADALUARSA
11	06-Feb-23	REKLAME HABIS MASA IZIN BERLAKU	KEC. PARMAKSIAN	PENERTIBAN SPANDUK/BALIHO YANG SUDAH KADALUARSA
12	08-Feb-23	BERJUALAN DI TROTOAR DAN BADAN JALAN	KEC. BALIGE	PENERTIBAN RUTIN PEDAGANG, PARKIE DAN LALU LINTAS PEKAN PORSEA
13	10-Feb-23	PENEMPATAN KJA/KJT TIDAK SESUAI DENGAN LOKASI YANG TELAH DITETAPKAN	KEC. BALIGE	PENGAMANAN PENERTIBAN KJA/KJT TA 2023
14	10-Feb-23	PEDAGANG BERJUALAN TIDAK DILOKASI YANG TELAH DITETAPKAN	KEC. BALIGE	PENERTIBAN PASAR YANG BERADA DI TERMINAL MINI, BALERONG DAN JANJI MARIA TAMPUBOLON



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA

15	15-Mar-23	MENGELOLA MILIK PEMERINTAH	KEC. PORSEA	PENGAMANAN PENGOSONGAN ASET DI CAFE SOPO MARPIKKIR
16	17-Mar-23	MENUTUP ALIRAN AIR KE WILAYAH PERTANIAN MASYARAKAT	KEC BALIGE	PENGAMANAN PEMBUKAAN IRIGASI YANG DITUTUP OLEH HOTMA NAIBAHO
17	18-Mar-23	MENUTUP ALIRAN AIR KE WILAYAH PERTANIAN MASYARAKAT	KEC BALIGE	PENGAMANAN PEMBUKAAN IRIGASI YANG DITUTUP OLEH HOTMA NAIBAHO
18	30-Mar-23	BERJUALAN DI TROTOAR DAN BADAN JALAN	KEC. BALIGE	PENGAMANAN PASAR TUMPAH BALIGE
19	30-Mar-23	MENGUASAI TANAH YANG BUKAN MILIKNYA	KEC. LAGUBOTI	PENGAMANAN PENOLAKAN PIHAK TANDA HUTAHAEAN TERHADAP PEMAKAMAN S MARPAUNG DI DESA MARTIBUNG
20	31-Mar-23	ADANYA MASYARAKAT YANG MENGANGGU KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, SEPERTI PERJUDIAN, BALAP LIAR DAN AKSI ASUSILA	KEC. BALIGE	RAZIA DALAM RANGKA MENANGGULANGI DAN MENINDAK BERBAGAI BENTUK KEJAHATAN PENYAKIT MASYARAKAT YANG MELIPUTI AKSI PREMANISME, PERJUDIAN, PORNOGRAFI, MINUMAN KERAS DAN PROSTITUSI YANG MERESAHKAN MASYARAKAT DI BULAN SUCI RAMADHAN 1444 H DI WILAYAH KAB. TOBA
21	01-Apr-23	ADANYA MASYARAKAT YANG MENGANGGU KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, SEPERTI PERJUDIAN, BALAP LIAR DAN AKSI ASUSILA	KEC. BALIGE	RAZIA DALAM RANGKA MENANGGULANGI DAN MENINDAK BERBAGAI BENTUK KEJAHATAN PENYAKIT MASYARAKAT YANG MELIPUTI AKSI PREMANISME, PERJUDIAN, PORNOGRAFI, MINUMAN KERAS DAN PROSTITUSI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA

				YANG MERESAHKAN MASYARAKAT DI BULAN SUCI RAMADHAN 1444 H DI WILAYAH KAB. TOBA
22	15 S/D 16 APRIL	BERJUALAN DI TROTOAR DAN BADAN JALAN	KEC. BALIGE	PENERTIBAN PASAR TUMPAH BALIGE
23	22-Apr-23	BERJUALAN DI TROTOAR DAN BADAN JALAN	KEC. SIGUMPAR	PENERTIBAN PASAR SIGUMPAR
24	23-Apr-23	BERJUALAN DI TROTOAR DAN BADAN JALAN	KEC. SIGUMPAR	PENERTIBAN PASAR SIGUMPAR
25	22-Mei-23	BERJUALAN DI TROTOAR DAN BADAN JALAN	KEC. BALIGE	PENERTIBAN PASAR LAGUBOTI
26	26-Mei-23	REKLAME HABIS MASA IZIN BERLAKU	KEC. TAMPAHAN	PENERTIBAN IZIN REKLAME
27	26-Mei-23	REKLAME HABIS MASA IZIN BERLAKU	KEC. BALIGE	PENERTIBAN IZIN REKLAME
28	26-Mei-23	REKLAME HABIS MASA IZIN BERLAKU	KEC. LAGUBOTI	PENERTIBAN IZIN REKLAME
29	10-Jun-23	ADANYA PENCURIAN DAN BALAP LIAR	KEC. BALIGE	GIAT PATROLI GABUNGAN TNI-POLRI SECARA SERENTAK DENGAN SASARAN TINDAK PIDANA 3C ( CURAT, CURAS DAN CURANMOR) AKSI PREMANISME
30	17-Jun-23	ADANYA PENCURIAN DAN BALAP LIAR	KEC. BALIGE	GIAT PATROLI GABUNGAN TNI-POLRI SECARA SERENTAK DENGAN SASARAN TINDAK PIDANA 3C ( CURAT, CURAS DAN CURANMOR) AKSI PREMANISME
31	24-Jun-23	ADANYA PENCURIAN DAN BALAP LIAR	KEC. BALIGE	GIAT PATROLI GABUNGAN TNI-POLRI SECARA SERENTAK DENGAN SASARAN TINDAK PIDANA 3C ( CURAT, CURAS DAN CURANMOR) AKSI PREMANISME



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA

32	01-Jul-23	ADANYA PENCURIAN DAN BALAP LIAR	KEC. BALIGE	GIAT PATROLI GABUNGAN TNI- POLRI SECARA SERENTAK DENGAN SASARAN TINDAK PIDANA 3C ( CURAT, CURAS DAN CURANMOR) AKSI PREMANISME
33	04-Jul-23	SISWA BOLOS DI JAM SEKOLAH	KEC. BALIGE	RAZIA ANAK SEKOLAH
34	06 Juli 2023	SISWA BOLOS DI JAM SEKOLAH	KEC. BALIGE	RAZIA ANAK SEKOLAH
35	08 Juli 2023	ADANYA PENCURIAN DAN BALAP LIAR	KEC. BALIGE	GIAT PATROLI GABUNGAN TNI- POLRI SECARA SERENTAK DENGAN SASARAN TINDAK PIDANA 3C ( CURAT, CURAS DAN CURANMOR) AKSI PREMANISME
36	11 Juli 2023	BANGUNAN TANPA IMB	KEC. ULUAN	PENGAMANAN MEDIASI ANTARA SDR JEFRI BUTARBUTAR DENGAN KEPALA DESA SIGAOL BARAT
37	10 Juli 2023	MENGUASAI TANAH MILIK PEMERINTAH	KEC. SILAEN	PENGAMANAN SOMASI ATAS PEMBANGUNAN SEBUAH RUMAH DIATAS TANAH PEMKAB TOBA SDR TOGAR NAPITUPULU YANG TERLETAK DILOKASI SD173567 SIRANDOS
38	13 Juli 2023	BANGUNAN TANPA IMB	KEC. BALIGE	PENINJAUAN BANGUNAN TANPA IMB
39	18 Juli 2023	GALIAN TANPA IZIN	KEC. HABINSARAN	PENINJAUAN GALIAN DAN MEDIASI WARGA DESA LUMBAN RUHAP
40	26 Juli 2023	BANGUNAN TANPA IMB	KEC. PARMAKSIAN	PENINJAUAN BANGUNAN TANPA IMB
41	02 Agustus 2023	GALIAN TANPA IZIN	KEC. PINTU POHAN MERANTI	PENINJAUAN LEGALITAS DAN EMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA

42	14 Agustus 2023	GALIAN TANPA IZIN	KEC. LUMBAN JULU	PENINJAUAN LAPANGAN TERKAIT GALIAN C YANG BERIZIN DAN TIDAK BERIZIN
43	15 Agustus 2023	BANGUNAN TANPA IMB	KEC BALIGE	PENINJAUAN BANGUNAN TANPA IMB
44	19 Agustus 2023	ADANYA PENCURIAN DAN BALAP LIAR	KEC. BALIGE	KEGIATAN RUTIN YANG DITINGKATKAN DALAM RANGKA OPS KANCIL TOBA 2023 TENTANG PENINDAKAN TERHADAP PENCURIAN DAN PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH KAB. TOBA
45	21 Agustus 2023	GALIAN TANPA IZIN	KEC. BALIGE	PENINJAUAN LAPANGAN TERKAIT GALIAN C YANG BERIZIN DAN TIDAK BERIZIN
46	21 Agustus 2023	GALIAN TANPA IZIN	KEC. LAGUBOTI	PENINJAUAN LAPANGAN TERKAIT GALIAN C YANG BERIZIN DAN TIDAK BERIZIN
47	11 Agustus 2023	BANGUNAN TANPA IMB	KEC. PARMAKSIAN	MEDIASI SENGKETA BANGUNAN TANPAIMB ANTARA OBEN SITORUS DAN WILSON SITORUS
48	15-Sep-23	BANGUNAN TANPA IMB	KEC. BALIGE	PENINJAUAN LAPANGAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN BANGUNAN TANPA IMB
49	15-Nov-23	ALIRAN AIR DITUTUP KE WILAYAH PERTANIAN MASYARAKAT	KEC. BALIGE	MEDIASI KONFLIK MASYARAKAT DENGAN HOTMA NAIBAO TENTANG PENUTUPAN IRIGASI PEATALUN
50	04 Desember 2023	BANGUNAN TANPA IMB	KEC. BALIGE	KUNJUNGAN LAPANGAN TERHADAP 3 (TIGA) OBJEK BANGUNAN YANG TERINDIKASI MELAKUKAN PELANGGARAN



				PEMANFAATAN RUANG DIDANAU TOBA
--	--	--	--	--------------------------------------

Sumber Data : Data dan Informasi Satpol PP Kab. Toba

Dari data di atas didapatkan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat penyelesaian K3} &= \frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100\% \\ &= \frac{50 \text{ kasus}}{50 \text{ kasus}} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Taget}} \times 100 \% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100 \% = 100 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan data dan informasi diatas terlihat bahwa tingkat pelanggaran K3 (ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) di Kabupaten Toba tahun 2023 ada sebanyak 50 kasus pelanggaran dari jumlah pelanggaran yang masuk dan teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 50 kasus pelanggaran, sehingga tingkat penyelesaian K3 sebesar 100% dengan kinerja yang tercapai sebesar 100%.

*d. Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

Perbandingan target dan realisasi pada indikator kinerja “Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah” ddpad dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 9 Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian
1.	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100%	97,94%	97,94%

Berikut data rekapitulasi pada indikator kinerja cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun 2023 :



Tabel 3. 10 Realisasi Capaian Kinerja Penunjang Urusan  
Pemerintah Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian
<b>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3	3	100
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	6	6	100
<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>91,48</b>	<b>91,48</b>
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	47	43	91,48
<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	4	4	100
Penyediaan peralatan rumah tangga	Paket	4	4	100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Paket	4	4	100
Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi	Laporan	4	4	100
<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan	Unit	1	1	100
<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Laporan	12	12	100
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	12	12	100
<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>96,15</b>	<b>96,15</b>
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan	unit	6	5	83,33



dinas atau kendaraan dinas jabatan				
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	12	12	100
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	8	8	100
<b>Total</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>97,94</b>	<b>97,94</b>

Sumber Data: Data dan Informasi Satpol PP Kab. Toba

Dari data di atas didapatkan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Taget}} \times 100 \%$$

$$= \frac{97,94\%}{100\%} \times 100 \% = 97,94 \%$$

Berdasarkan data diatas realisasi indikator kinerja capaian kinerja penunjang urusan pemerintah daerah adalah 97,94% sehingga persentase capaian kerjanya sebesar 97,94%. Kinerja tercapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”.

## 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara realisasi kinerja pada sasaran strategis 1 “Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum” tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk 4 (empat) indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja 4 (empat) Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			
		2020	2021	2022	2023
1.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	-	-	88%	100%
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	85%	100%	44,44%	100%
3.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	-	-	109%	100%
4.	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	89%	97,94%



Realisasi kinerja pada indikator “Persentase gangguan trantibum yang dapat terselesaikan” terlihat meningkat dari tahun ke tahun yaitu 88% pada tahun 2022 dengan jumlah pelanggaran yang terselesaikan sebanyak 37 kasus dari 42 kasus pengaduan pelanggaran trantibum yang diprediksi akan terjadi. Pada tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja mampu menyelesaikan kasus pelanggaran trantibum sebanyak 50 kasus dari 50 kasus pengaduan pelanggaran yang terjadi, sehingga realisasi kinerjanya yaitu 100%. Pada tahun 2023 jumlah pelanggaran pengaduan yang masuk lebih banyak dibandingkan tahun 2022. Beberapa alasan yang menyebabkan hal tersebut yaitu pengaduan pelanggaran yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba pada tahun 2023 lebih beragam dan ada beberapa kasus yang terjadi di tahun 2023 namun tidak terjadi di tahun 2022. Kasus tersebut seperti penertiban Keramba Jaring Apung (KJA), kasus penutupan aliran air ke wilayah pertanian masyarakat, kasus perjudian, pencurian motor, balap liar, dan aksi asusila.

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dari tahun ke tahun menunjukkan realisasi kinerja yang tidak konstan. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan di tahun 2020 sebesar 85% meningkat di tahun 2021 menjadi 100% namun terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 44,44% dan meningkat menjadi 100% pada tahun 2023. Namun capaian kinerja pada indikator ini selalu melebihi target tahunan. Capaian kinerja yang tidak konstan tersebut disebabkan oleh perbedaan jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan dan jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi setiap tahunnya. Pada tahun 2022 jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan sebanyak 8 Perda/Perkada dari 18 Perda/Perkada yang memuat sanksi di Kabupaten Toba, sedangkan di tahun 2023 jumlah Perda dan Perkada yang



ditegakkan sebanyak 17 Perda/Perkada yang mana 7 Perda/Perkada ditegakkan dan dilaksanakan kepada masyarakat sedangkan 10 Perda/Perkada yang memuat sanksi ditegakkan melalui kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan instansi terkait. Perkada yang tidak ditegakkan lagi di tahun 2023 yaitu Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 43 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan. Karena pada 30 Desember 2022 Pemerintah Pusat sudah resmi mencabut kebijakan PPKM yang tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) di wilayah Kabupaten Toba terjadi penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 hal ini disebabkan karena ada penurunan kasus pelanggaran K3 di tahun 2023. Pada tahun 2022 pelanggaran K3 yang terjadi sebanyak 46 kasus sedangkan di tahun 2023 kasus pelanggaran K3 yang terjadi sebanyak 50 kasus.

Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba mengalami peningkatan realisasi kinerja dari tahun ke tahun yaitu sebesar 89% pada tahun 2022 dan 97,94% pada tahun 2023.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis dan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja 2023, Jangka Menengah dan Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2023	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	-



2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	29%	-
3.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	100%	100%	-
4.	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	97,94%	100%	-

Jika dibandingkan dengan Target Jangka Menengah, capaian sasaran berdasarkan 4 (empat) indikator yang diperoleh dari tahun ke tahun nilainya cenderung naik. Realisasi kinerja pada indikator “Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan” pada tahun 2022 dan 2023 selalu tercapai dengan angka 100%. Capaian tersebut sesuai dengan target jangka menengah yaitu 100%.

Capaian kinerja pada indikator “Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan” pada tahun 2020 sebesar 85% naik menjadi 100% pada tahun 2021, namun di tahun 2022 menurun menjadi 44,44% dan kembali meningkat menjadi 100% di tahun 2023. Capaian kinerja tersebut di atas target jangka menengah yaitu 29%.

Capaian kinerja pada indikator “Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)” pada tahun 2022 dan 2023 selalu tercapai sebesar 100%. Capaian tersebut sesuai target jangka menengah dan target tahunan.

Capaian kinerja pada indikator “Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah” pada tahun 2022 sebesar 89% naik menjadi 97,94% pada tahun 2023. Capaian tersebut di bawah target jangka menengah dan target tahunan.

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan**

##### *a. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan*



Faktor penyebab tercapainya indikator ini serta solusi yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kerjasama yang baik dengan dinas-dinas/instansi terkait yang dilakukan untuk menyelenggarakan trantibum.
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba juga selalu melakukan patroli rutin khususnya di wilayah Kecamatan Balige yang merupakan ibukota kabupaten untuk memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Kegiatan patroli juga dilaksanakan di kawasan sekolah di Kecamatan Balige yang dilaksanakan oleh petugas bersama dengan intel Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba untuk mencegah terjadinya tauran atau tindak kenakalan-kenakalan pelajar yang mungkin dilakukan. Kegiatan patroli juga dilakukan ke tempat-tempat yang diduga sebagai penyebab gangguan trantibum dan tentunya dengan koordinasi bersama TNI dan Polri.
- 3) Dalam hal kegiatan-kegiatan sosial dimasyarakat seperti kegiatan onan (pekanan), acara penting, dan acara lainnya yang menimbulkan adanya perkumpulan masyarakat maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba selalu melakukan pengamanan dan penertiban untuk melindungi dan menjaga terhadap personil, materil, aset, maupun lokasi agar aman dan kondusif. Kegiatan pengamanan juga dilakukan secara rutin selama 24 jam di kompleks Kantor Bupati, Kantor DPRD serta rumah-rumah dinas pejabat Kabupaten Toba.
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba juga melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait masalah bangunan tanpa izin (IMB), keramba jaring apung yang keberadaannya tidak pada lokasi yang ditentukan, galian C yang tidak memiliki izin,



serta pedagang yang menjual barang tanpa cukai (rokok ilegal).

*b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan*

Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan di Kabupaten Toba yaitu :

- 1) Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari sisi kuantitas di daerah masih sangat terbatas. Jumlah PPNS yang aktif di Kabupaten Toba sebanyak 5 (lima) orang. Namun sampai saat ini belum ada regulasi khusus untuk perhitungan jumlah kebutuhan PPNS di daerah.
- 2) Jumlah dan kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba yang terbatas untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- 3) Sarana dan prasarana belum memadai dalam mendukung tugas operasional dilapangan terutama dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada;
- 4) Benturan pendapat dengan masyarakat karena kurangnya pemahaman masyarakat akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait terhadap Perda dan Perkada yang akan ditegakkan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dalam peningkatan capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dapat maksimal dilaksanakan.
- 2) Peningkatan jumlah melalui pengadaan sarana dan prasana karena sangat diperlukan dalam mendukung tugas, fungsi dan kewenangan. Selain itu membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah



Pusat agar mendapat dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

- 3) Melakukan sosialisasi baik secara langsung kepada masyarakat maupun melalui media sosial terkait Perda dan Perkada yang berlaku di Kabupaten Toba.

*c. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)*

Dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba juga dihadapkan dengan permasalahan dan kendala dilapangan seperti :

- 1) Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun ASN Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dari sisi kuantitas dan kualitas masih sangat terbatas;
- 2) Ketersediaan saran dan prasarana masih sangat kurang karena sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dalam peningkatan capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba salah satunya dengan cara rutin melaksanakan latihan bela diri di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba;
- 2) Menjaga keindahan, nyaman, dan kebersihan di lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dengan rutin melaksanakan kegiatan gotong royong. Selain di lingkungan kantor, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba juga ikut membantu menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan Balige melalui kegiatan gotong royong di titik-titik tertentu yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Toba.



- 3) Melakukan kegiatan patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, deteksi dan cegah dini, serta pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat.
- 4) Pengadaan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas operasional di lapangan terutama dalam pelaksanaan Trantibum.

*d. Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah*

Salah satu faktor penyebab tercapainya indikator ini adalah kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan administrasi kantor yang rutin dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan dari program dan kegiatan lainnya.

## **5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

*a. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan*

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA. 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 5.818.246.788 dengan realisasi sebesar Rp. 5.786.768.369 atau 99,46%. Jika dibandingkan realisasi keuangan 99,46% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terdapat **efisiensi** penggunaan sumber daya keuangan dalam mencapai sasaran tersebut.

*b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan*

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA. 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program yaitu sebesar Rp. 197.012.102 dengan realisasi sebesar Rp. 183.578.461 atau 93,18%. Jika dibandingkan realisasi keuangan 93,18% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terdapat **efisiensi** penggunaan sumber daya keuangan dalam mencapai sasaran tersebut



*c. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)*

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA. 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 5.818.246.788 dengan realisasi sebesar Rp. 5.786.768.369 atau 99,46%. Jika dibandingkan realisasi keuangan 99,46% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terdapat **efisiensi** penggunaan sumber daya keuangan dalam mencapai sasaran tersebut.

**6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

*a. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan*

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Toba. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;
- 2) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- 3) Peningkatan kapasitas SMD Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.



*b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan*

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan oleh Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota serta Sub Kegiatan Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- 2) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu sub kegiatan pengembangan kapasitas dan karier PPNS.

*c. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)*

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan oleh Bidang Penegakan Peraturan dan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;



- 2) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- 3) Peningkatan kapasitas SMD Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.

*d. Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah*

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba. Program ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- 2) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
- 3) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapankantor, sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga, sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
- 4) Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;



- 5) Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 6) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya; sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.

**Sasaran  
Strategis 2****Meningkatnya pencegahan  
penanggulangan penyelamatan kebakaran  
dan penyelamatan non kebakaran**

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai sasaran sebagaimana tertuang dalam RENSTRA 2021-2026 yaitu “Meningkatnya Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran”. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :

**1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi***a. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran*

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di wilayah Kabupaten Toba diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 13 Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian
1.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%

Berdasarkan pengukuran pencapaian indikator kinerja persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran realisasi capaian kerjanya yaitu 100%, sehingga capaian kinerja ini tercapai dengan kriteria “Sangat tinggi”. Jumlah kejadian kebakaran yang terjadi selama tahun 2023 sebanyak 48 kejadian dan jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebanyak 48 kejadian. Realisasi jumlah kejadian kebakaran lebih rendah dibandingkan dengan target yaitu 56 kejadian.



Data kejadian kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten  
Toba dirincikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14 Data Kejadian Kebakaran se-Kabupaten Toba

NO	NAMA KEJADIAN BENCANA	TANGGAL KEJADIAN	WAKTU KEJADIAN (JAM:MENIT)	WAKTU LAPORAN KEJADIAN DITERIMA (JAM:MENIT)	LOKASI	KORBAN JIWA	KK Terdampak	Orang Terdampak
1	KEBAKARAN RUMAH	02 JANUARI 2023	03.40 WIB	03.55 WIB	di HKBP TAMPAHAN KEC. BALIGE	TIDAK	1	3
2	POHON AREN	21 JANUARI 2023	08.46 WIB	09. 15 WIB	SIANIPAR SIHAILHAIL KEC. BALIGE	TIDAK	0	0
3	KEBAKARAN RUMAH	08 MARET 2023	08.04 WIB	07.40 WIB	DESA LUMBAN GORAT KEC. BALIGE	TIDAK	4	14
4	KEBAKARAN RUMAH	01 APRIL 2023	08.47 WIB	09.19 WIB	JALAN GREJA BALIGE KEC. BALIGE	TIDAK	3	9
5	KEBAKARAN BAMBU	17 JUNI 2023	15.44 WIB	16.05 WIB	SARIBU RAJA JANJI MARIA KEC BALIGE	TIDAK	1	6
6	KEBAKARAN RUMAH	07 MEI 2023	05.22 WIB	05.30 WIB	DI LUMBAN BINANGA KEC. LAGUBOTI	TIDAK	1	6
7	KEBAKARAN BAMBU	29 MEI 2023	17.45 WIB	17.30 WIB	DESA LUMBAN BINANGA KEC. LAGUBOTI	TIDAK	1	6
8	KEBAKARAN BAMBU	07 JUNI 2023	12.15 WIB	13.15 WIB	DESA UJUNG TANDUK KEC. LAGUBOTI	TIDAK	0	0
9	KEBAKARAN RUMAH	11 APRIL 2023	07.30 WIB	08.47 WIB	DESA SITUA-TUA KEC. SIGUMPAR	TIDAK	1	4
10	KEBAKARAN POHON NATAL	28 APRIL 2023	11.47 WIB	11.48 WIB	PASAR PORSEA KEC. PORSEA	TIDAK	0	0
11	KEBAKARAN RUMAH	28 FEBRUARI 2023	02.11 WIB	02.45 WIB	DESA AEK NATOLU KEC. LUMBAN JULU	TIDAK	0	0
12	KEBAKARAN BAMBU	19 JUNI 2023	17.00 WIB	18.00 WIB	DESA JANGGA TORUAN SOSOR DOLOK HATINGGIAN KEC. LUMBAN JULU	TIDAK	0	0
13	KEBAKARAN RUMAH	05 MARET 2023	03. 59WIB	08.06 WIB	DESA SUKA RAME KEC. TAMPAHAN	TIDAK	0	0
14	KEBAKARAN LAHAN	20 JUNI 2023	18.00 WIB	18.06 WIB	GURGUR AEK RAJA KEC. TAMPAHAN	TIDAK	0	0
15	KEBAKARAN LAHAN	21 JUNI 2023	14.59 WIB	15.50 WIB	GURGUR AEK RAJA KEC. TAMPAHAN	TIDAK	0	0
16	KEBAKARAN BAMBU	07 JUNI 2023	18.00 WIB	18.32 WIB	DESA AEK NALAS KEC.	TIDAK	0	0



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA

					ULUAN			
17	KEBAKARAN RUMAH	27 JUNI 2023	11.00 WIB	11.15 WIB	DESA LUMBAN GAOL KEC. BALIGE	TIDAK	0	0
18	KEBAKARAN RUMAH	18 MARET 2023	12.30 WIB	12.45 WIB	DESA LUMBAN PEA KEC. BALIGE	TIDAK	0	0
19	KEBAKARAN RUMAH	08 Juli 2023	02.30 WIB	03. 43 Wib	DESA NAULI KEC. SIGUMPAR	TIDAK	1	3
		08 Juli 2023	02.30 WIB	03. 43 Wib	DESA NAULI KEC. SIGUMPAR	TIDAK	1	4
20	Kebakaran Dapur Rumah	20 JULI 2023	05.30 WIB	06. 44 WIB	DESA LUMBAN GURNING KEC.PARMAK SIAN	TIDAK	1	5
21	KEBAKARAN BAMBU	21 JULI 2023	08.00 WIB	08. 58 WIB	DESA PARDOMUAN , JLN PARSOBURAN KEC.SILAEN	TIDAK	0	0
22	KEBAKARAN BAMBU	24 JULI 2023	04.00 WIB	04.45 WIB	DESA SITOLUAMA KEC, LAGUBOTI	TIDAK	0	0
23	KEBAKARAN SEMAK	25 JULI 2023	06.56 WIB	07. 41 WIB	LUMBAN SILINTONG KEC.BALIGE	TIDAK	0	0
24	KEBAKARAN SEMAK	26 JULI 2023	03.35 WIB	04. 00 WIB	DI BELAKANG SD MUTIARA KEL.BALIGE III KEC.BALIGE	TIDAK	0	0
25	KEBAKARAN POHON AREN	27 JULI 2023	09. 30 WIB	10. 27 WIB	DESA HUTANAMOR A KEC. SILAEN	TIDAK	0	0
26	KEBAKARAN BAMBU	28 JULI 2023	14.00 WIB	14.47 WIB	DESA SIMATIBUNG KEC, LAGUBOTI	TIDAK	0	0
27	KEBAKARAN BAMBU	28 JULI 2023	04.20 WIB	04.53 WIB	DESA PARPAREAN III KEC, PORSEA	TIDAK	0	0
28	KEBAKARAN BERINGIN	28 JULI 2023	20.45 WIB	21.28 WIB	DESA TAMBUNAN LUMBAN PEA KEC, BALIGE	TIDAK	0	0
29	KEBAKARAN BAMBU	29 JULI 2023	07.20 WIB	07.45 WIB	DESA SITAngKOLA KEC, LAGUBOTI	TIDAK	0	0
30	KEBAKARAN PEMBUANG AN SAMPAH	31 JULI 2023	08. 45 WIB	09.15 WIB	DESA PITU BOSI KEC, LAGUBOTI	TIDAK	0	0
31	KEBAKARAN RUMAH DAN RUKO	1 AGUSTUS 2023	21.00 WIB	22. 56 WIB	DI SIBOLA HOTANGSAS KEC, BALIGE	TIDAK	1	4
32	KEBAKARAN BAMBU	02 AGUSTUS 2023	11.00 WIB	11.53 WIB	BALIGE III KEC, BALIGE	TIDAK	0	0
33	KEBAKARAN BAMBU	03 AGUSTUS 2023	01.00 WIB	01.24 WIB	LUMBAN MANULLANG KEC,	TIDAK	0	0



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA

					SIGUMPAR			
34	KEBAKARAN BAMBU	03 AGUSTUS 2023	10.53 WIB	11.23 WIB	DESA SITAKOLA KEC, LAGUBOTI	TIDAK	0	0
35	KEBAKARAN RUMAH	07 AGUSTUS 2023	11.20 WIB	12.49 WIB	DESA HATNGGIAN KEC, LUMBAN JULU	TIDAK	1	3
36	KEBAKARAN RUMAH	21 Agustus 2023	06.00 WIB	06.58 WIB	DESA SITORANG JAE KEC. SIGUMPAR	TIDAK	2	7
37	KEBAKARAN RUMAH	25 AGUSTUS 2023	11.24 WIB	12.28 WIB	DESA JANGGA DOLOK KEC. LUMBAN JULU	TIDAK	1	4
38	KEBAKARAN RUMAH	26 AGUSTUS 2023	02.12 WIB	02.30 WIB	DESA DOLOK JIOR KEC. SIGUMPAR	TIDAK	1	3
39	KEBAKARAN RUMAH	03,SEPTEM BER 2023	04.34 WIB	04.49 WIB	DESA LONGAT KEC.BALIGE	TIDAK	1	2
40	KEBAKARAN RUMAH	24,SEPTEM BER2023	12.20 WIB	12.30 WIB	LUMBAN BUL-BUL KEC BALIGE	TIDAK	1	3
41	KEBAKARAN POHON AREN	05 OKTOBER 2023	16.47 WIB	17.04 WIB	LUMBAN HOLBUNG	TIDAK	0	0
42	KEBAKARAN LAHAN	13 OKTOBER 2023	13.42 WIB	14 47 WIB	DESA NARUMONDA KEC,SIANTAR NARUMONDA	TIDAK	0	0
43	KEBAKARAN RUMAH	14 OKTOBER 2023	15.39 WIB	15.40 WIB	PARSOBURAN	TIDAK	2	4
44	KEBAKARAN SEMAK	18 OKTOBER 2023	17.37 WIB	17.49 WIB	PARSOBURAN	TIDAK	0	0
45	KEBAKARAN RUMAH	20 OKTOBER 2023	14.15 WIB	15.05 WIB	PARSOBURAN	TIDAK	3	5
46	KEBAKARAN RUMAH	19-Nov-23	14.47 WIB	15.11 WIB	PARSOBURAN	TIDAK	2	4
47	KEBAKARAN RUMAH	23 DESEMBER 2023	19.20 WIB	19.45 WIB	HINALANG	TIDAK	1	4
48	KEBAKARAN SEPEDA MOTOR	28-Des-23	16.53 WIB	17.01 WIB	PASAR PORSEA KEC. PORSEA	TIDAK	0	0

Sumber Data: Data dan Informasi Satpol PP Kab. Toba

*b. Waktu tanggap (response time rate) penanganan kebakaran*

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “Waktu tanggap (*response time rate*) penanganan kebakaran” dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.15 Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Pencapaian
1.	Waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) penanganan kebakaran	20 Menit	21,77 Menit	91,15%

Dari tabel di atas diperoleh rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{20 \text{ menit} - (21,77 \text{ menit} - 20 \text{ menit})}{20 \text{ menit}} \times 100\% \\ &= 91,15\% \end{aligned}$$

Berdasarkan pengukuran pencapaian indikator kinerja Waktu tanggap (*response time rate*) penanganan kebakaran terlihat bahwa realisasi capaian kinerja yaitu 91,15% atau tercapai dengan kriteria “Sangat tinggi”. Namun realisasi kinerja yang tercapai masih dibawah target tahunan yang ditentukan yaitu 20 menit. Dari jumlah keseluruhan kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Toba (48 kejadian) hanya 14 kejadian yang memenuhi waktu tanggap (*response time rate*) 15 menit atau sebesar 29,16%.. Berikut data kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Toba yang memenuhi waktu tanggap (*response time rate*) penanganan kebakaran :

Tabel 3. 16 Data Pelayanan Kejadian Kebakaran dengan Waktu Tanggap (*Response Time Rate*)

NO	NAMA KEJADIAN BENCANA	TANGGAL KEJADIAN	WAKTU KEJADIAN (JAM:MENIT)	WAKTU LAPORAN KEJADIAN DITERIMA (JAM:MENIT)	LOKASI	WAKTU TANGGAP (RESPONSE TIME) (MENIT)
1	KEBAKARAN RUMAH	02 JANUARI 2023	03.40 WIB	03.55 WIB	di HKBP TAMPAHAN KEC. BALIGE	14
2	POHON AREN	21 JANUARI 2023	08.46 WIB	09. 15 WIB	SIANIPAR SIHAILHAIL KEC. BALIGE	17
3	KEBAKARAN RUMAH	08 MARET 2023	08.04 WIB	07.40 WIB	DESA LUMBAN GORAT KEC. BALIGE	30
4	KEBAKARAN RUMAH	01 APRIL 2023	08.47 WIB	09.19 WIB	JALAN GREJA BALIGE KEC. BALIGE	12



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA

5	KEBAKARAN BAMBU	17 JUNI 2023	15.44 WIB	16.05 WIB	SARIBU RAJA JANJI MARIA KEC. BALIGE	17
6	KEBAKARAN RUMAH	07 MEI 2023	05.22 WIB	05.30 WIB	DI LUMBAN BINANGA KEC. LAGUBOTI	11
7	KEBAKARAN BAMBU	29 MEI 2023	17.45 WIB	17.30 WIB	DESA LUMBAN BINANGA KEC. LAGUBOTI	30
8	KEBAKARAN BAMBU	07 JUNI 2023	12.15 WIB	13.15 WIB	DESA UJUNG TANDUK KEC. LAGUBOTI	15
9	KEBAKARAN RUMAH	11 APRIL 2023	07.30 WIB	08.47 WIB	DESA SITUA-TUA KEC. SIGUMPAR	25
10	KEBAKARAN POHON NATAL	28 APRIL 2023	11.47 WIB	11.48 WIB	PASAR PORSEA KEC. PORSEA	25
11	KEBAKARAN RUMAH	28 FEBRUARI 2023	02.11 WIB	02.45 WIB	DESA AEK NATOLU KEC. LUMBAN JULU	25
12	KEBAKARAN BAMBU	19 JUNI 2023	17.00 WIB	18.00 WIB	DESA JANGGA TORUAN SOSOR DOLOK HATINGGIAN KEC. LUMBAN JULU	30
13	KEBAKARAN RUMAH	05 MARET 2023	03. 59WIB	08.06 WIB	DESA SUKA RAME KEC. TAMPAHAN	15
14	KEBAKARAN LAHAN	20 JUNI 2023	18.00 WIB	18.06 WIB	GURGUR AEK RAJA KEC. TAMPAHAN	30
15	KEBAKARAN LAHAN	21 JUNI 2023	14.59 WIB	15.50 WIB	GURGUR AEK RAJA KEC. TAMPAHAN	14
16	KEBAKARAN BAMBU	07 JUNI 2023	18.00 WIB	18.32 WIB	DESA AEK NALAS KEC. ULUAN	14
17	KEBAKARAN RUMAH	27 JUNI 2023	11.00 WIB	11.15 WIB	DESA LUMBAN GAOL KEC. BALIGE	18
18	KEBAKARAN RUMAH	18 MARET 2023	12.30 WIB	12.45 WIB	DESA LUMBAN PEAK KEC. BALIGE	17
19	KEBAKARAN RUMAH	08 Juli 2023	02.30 WIB	03. 43 Wib	DESA NAULI KEC. SIGUMPAR	30
		08 Juli 2023	02.30 WIB	03. 43 Wib	DESA NAULI KEC. SIGUMPAR	30
20	Kebakaran Dapur Rumah	20 JULI 2023	05.30 WIB	06. 44 WIB	DESA LUMBAN GURNING KEC.PARMAK SIAN	15
21	KEBAKARAN BAMBU	21 JULI 2023	08.00 WIB	08. 58 WIB	DESA PARDOMUAN , JLN PARSOBURAN KEC.SILAEN	35



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA

22	KEBAKARAN BAMBU	24 JULI 2023	04.00 WIB	04.45 WIB	DESA SITOLUAMA KEC, LAGUBOTI	20
23	KEBAKARAN SEMAK	25 JULI 2023	06.56 WIB	07.41 WIB	LUMBAN SILINTONG KEC. BALIGE	12
24	KEBAKARAN SEMAK	26 JULI 2023	03.35 WIB	04.00 WIB	DI BELAKANG SD MUTIARA KEL. BALIGE III KEC. BALIGE	10
25	KEBAKARAN POHON AREN	27 JULI 2023	09.30 WIB	10.27 WIB	DESA HUTANAMORA KEC. SILAEN	30
26	KEBAKARAN BAMBU	28 JULI 2023	14.00 WIB	14.47 WIB	DESA SIMATIBUNG KEC, LAGUBOTI	25
27	KEBAKARAN BAMBU	28 JULI 2023	04.20 WIB	04.53 WIB	DESA PARPAREAN III KEC, PORSEA	10
28	KEBAKARAN BERINGIN	28 JULI 2023	20.45 WIB	21.28 WIB	DESA TAMBUNAN LUMBAN PEA KEC, BALIGE	20
29	KEBAKARAN BAMBU	29 JULI 2023	07.20 WIB	07.45 WIB	DESA SITANGKOLA KEC, LAGUBOTI	25
30	KEBAKARAN PEMBUANGAN SAMPAH	31 JULI 2023	08.45 WIB	09.15 WIB	DESA PITU BOSI KEC, LAGUBOTI	25
31	KEBAKARAN RUMAH DAN RUKO	1 AGUSTUS 2023	21.00 WIB	22.56 WIB	DI SIBOLA HOTANGSAS KEC, BALIGE	10
32	KEBAKARAN BAMBU	02 AGUSTUS 2023	11.00 WIB	11.53 WIB	BALIGE III KEC, BALIGE	10
33	KEBAKARAN BAMBU	03 AGUSTUS 2023	01.00 WIB	01.24 WIB	LUMBAN MANULLANG KEC, SIGUMPAR	25
34	KEBAKARAN BAMBU	03 AGUSTUS 2023	10.53 WIB	11.23 WIB	DESA SITAKOLA KEC, LAGUBOTI	25
35	KEBAKARAN RUMAH	07 AGUSTUS 2023	11.20 WIB	12.49 WIB	DESA HATNGGIAN KEC, LUMBAN JULU	25
36	KEBAKARAN RUMAH	21 Agustus 2023	06.00 WIB	06.58 WIB	DESA SITORANG JAE KEC. SIGUMPAR	30
37	KEBAKARAN RUMAH	25 AGUSTUS 2023	11.24 WIB	12.28 WIB	DESA JANGGA DOLOK KEC. LUMBAN JULU	25
38	KEBAKARAN RUMAH	26 AGUSTUS 2023	02.12 WIB	02.30 WIB	DESA DOLOK JIOR KEC. SIGUMPAR	30
39	KEBAKARAN RUMAH	03, SEPTEM BER 2023	04.34 WIB	04.49 WIB	DESA LONGAT KEC. BALIGE	17
40	KEBAKARAN RUMAH	24, SEPTEM BER 2023	12.20 WIB	12.30 WIB	LUMBAN BUL-BUL KEC	17



					BALIGE	
41	KEBAKARAN POHON AREN	05 OKTOBER 2023	16.47 WIB	17.04 WIB	LUMBAN HOLBUNG	25
42	KEBAKARAN LAHAN	13 OKTOBER 2023	13.42 WIB	14.47 WIB	DESA NARUMONDA KEC,SIANTAR NARUMONDA	20
43	KEBAKARAN RUMAH	14 OKTOBER 2023	15.39 WIB	15.40 WIB	PARSOBURAN	25
44	KEBAKARAN SEMAK	18 OKTOBER 2023	17.37 WIB	17.49 WIB	PARSOBURAN	25
45	KEBAKARAN RUMAH	20 OKTOBER 2023	14.15 WIB	15.05 WIB	PARSOBURAN	25
46	KEBAKARAN RUMAH	19-Nov-23	14.47 WIB	15.11 WIB	PARSOBURAN	25
47	KEBAKARAN RUMAH	23 DESEMBER 2023	19.20 WIB	19.45 WIB	HINALANG	25
48	KEBAKARAN SEPEDA MOTOR	28-Des-23	16.53 WIB	17.01 WIB	PASAR PORSEA KEC. PORSEA	15
<b>RATA-RATA RESPONSE TIME</b>						<b>21,77 MENIT</b>

Sumber Data : Data dan Informasi Satpol PP Kab. Toba

## 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja Sasaran 2 “Meningkatnya Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran” tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk 2 (dua) indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja 4 (Empat) Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			
		2020	2021	2022	2023
1.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	-	100%	100%
2.	Waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) penanganan kebakaran	20 Menit	20 Menit	20 Menit	21,77 Menit

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada tahun 2022 dan 2023 memiliki capaian realisasi kinerja yang tetap yaitu 100%. Namun jumlah kejadian kebakaran yang terjadi pada tahun 2022 sebanyak 125



kejadian mengalami penurunan di tahun 2023 sebanyak 48 kejadian kebakaran yang diberi pelayanan penyelamatan kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba.

Waktu tanggap (*response time rate*) penanganan kebakaran di wilayah Kabupaten Toba tertangani dalam waktu 20 menit pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 namun mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 21,77 menit dengan jumlah kejadian kebakaran sebanyak 14 kejadian yang memenuhi waktu tanggap (*response time*) 15 menit.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Stragtegis dan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah dan standar nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja 2023, Jangka Menengah dan Nasioanl

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2023	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	-
2.	Waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) penanganan kebakaran	21,77 Menit	20 Menit	15 Menit

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian sasaran dari indikator kinerja Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tahun 2022 dan 2023 selalu tercapai dengan persentase capaian realisasi sebesar 100%.

Capaian indikator Waktu tanggap (*response time rate*) penanganan kebakaran tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 selalu memenuhi target jangka menengah yaitu 20 menit namun terjadi penurunan waktu tanggap (*response time*) di



tahun 2023 menjadi 21,77 menit. Jika dibandingkan dengan standar nasional sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota maka target jangka menengah dan capaian realisasi kinerja tahun 2023 untuk indikator ini masih jauh dari yang ditetapkan yaitu 15 menit.

#### **4. Analisis penyebab keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan**

##### *a. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran*

Salah satu penyebab tercapainya indikator ini adalah kejadian kebakaran terjadi diwilayah yang mampu dijangkau oleh petugas pemadam kebakaran sehingga dapat segera diberikan pelayanan penyelamatan dan evakuasi terhadap korban kebakaran. Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari permasalahan dan kendala seperti :

- 1) Kurangnya anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana pemadam kebakaran seperti mobil damkar, alat pelindung diri aparatur, serta perlengkapan pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah.
- 2) Ketersediaan pos damkar di setiap kecamatan dan desa/kelurahan yang masih sangat terbatas. Untuk wilayah Kabupaten Toba hanya tersedia 3 (tiga) pos damkar yaitu di Kecamatan Balige (Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba), Kecamatan Porsea, dan Kecamatan Habinsaran.



*b. Waktu tanggap (response time rate) penanganan kebakaran*

Capaian kinerja pada indikator ini belum memenuhi target jangka menengah dan standar nasional. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba hanya mampu memberikan pelayanan pemadaman kebakaran dengan waktu tanggap (*response time*) sebanyak 14 kejadian dari 48 kejadian kebakaran dengan rata-rata waktu tanggap (*response time*) yang diperoleh yaitu 21,77 menit. Capaian ini masih sangat jauh dari target nasional dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa tingkat waktu tanggap (*response time*) sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi adalah 15 menit. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Jumlah tenaga pemadam kebakaran masih terbatas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa setiap 1 (satu) unit kendaraan pemadam kebakaran (mobil pemadam kebakaran) dioperasikan oleh 6 (enam) petugas damkar dengan pembagian tugas 1 (satu) orang sebagai Komandan Regu, 1 (satu) orang sebagai pengemudi sekaligus Operator Pompa, dan 4 (empat) orang anggota petugas damkar yang dilengkapi dengan alat perlindungan diri aparatur.
- 2) Fasilitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang masih belum sesuai standarisasi seperti dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122



Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah. Hal ini disebabkan oleh harga peralatan pemadam kebakaran yang sangat mahal sehingga pemerintah daerah belum mampu untuk memenuhi penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai dengan standar yang ditentukan.

- 3) Belum terbentuknya barisan relawan kebakaran di Kabupaten Toba yang mampu membantu untuk memberikan pelayanan penyelamatan dan evakuasi terhadap korban kebakaran.
- 4) Ketersediaan jumlah pos damkar yang sangat terbatas yaitu hanya 3 (tiga) pos damkar untuk memberikan pelayanan pemadam kebakaran di seluruh wilayah Kabupaten Toba. Hal ini juga menjadi penyebab tidak tercapainya waktu tanggap (*response time*) 15 menit. Karena wilayah Kabupaten Toba yang luas terdiri dari 16 kecamatan, 13 kelurahan dan 231 desa sehingga tidak mungkin mampu terjangkau oleh petugas pemadam kebakaran.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian dari indikator tersebut yaitu :

- 1) Pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai dengan standardisasi yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan serta kebutuhan daerah.
- 2) Mendirikan pos sektor damkar di setiap kecamatan dan mendirikan pos damkar di setiap desa/kelurahan maupun gabungan beberapa desa/kelurahan.
- 3) Membangun kerjasama dengan masyarakat melalui pembentukan barisan relawan kebakaran dibawah binaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dalam hal ini



dilaksanakan oleh Bidang Pemadam Kebakaran dan Keselamatan.

- 4) Setiap aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan wajib memiliki kompetensi dengan mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kapasitas baik pelatihan maupun bentuk lainnya.
- 5) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Bidang Pemadam kebakaran dan Keselamatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dengan melibatkan masyarakat diwilayah Kecamatan Balige.

## 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### a. *Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran*

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA. 2023 untuk mendukung pencapaian indikator ini terdiri dari 1 (satu) Program sebesar Rp. 379.906.548 dengan realisasi sebesar Rp. 350.837.004 atau 92,35%. Jika dibandingkan realisasi keuangan 92,35% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terdapat **efisiensi** penggunaan sumber daya keuangan dalam mencapai sasaran tersebut.

## 6. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 2 dari 2 (dua) indikator kinerja ini adalah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang dilaksanakan oleh Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan Satuan Polisi



Pamong Praja Kabupaten Toba. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pembinaan aparatur pemadam kebakaran;
- 2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat.

### **C. Realisasi Anggaran**

Berikut merupakan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun Anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang disahkan pada tanggal 25 Oktober 2023 :

- a) Belanja Operasi sebesar Rp. 12.334.999.825 dengan realisasi sebesar Rp. 12.118.085.364 atau 98,24%.
- b) Belanja Modal sebesar Rp. 24.447.720 dengan realisasi sebesar Rp. 52.377.100 atau 96,20%.

Tahun 2023 realisasi Belanja Daerah dengan alokasi sebesar Rp. 12.389.447.545 terealisasi sebesar Rp. 12.170.462.464 atau 98,23% dengan membiayai 3 (tiga) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja untuk masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut :



Tabel 3. 19 Realisasi Anggaran Per Sasaran

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI BELANJA DAN CAPAIAN KINERJA				SISA DANA
	TOLOK UKUR	TARGET		KEUANGAN		CAPAIAN KINERJA	% FISIK	
				(Rp)	(%)			
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>5.994.282.107</b>	<b>5.849.278.630,00</b>	<b>97,58</b>	<b>97,94%</b>	<b>97,94%</b>	<b>145.003.477</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian kinerja perangkat daerah</b>	100%	33.043.605	<b>30.777.870,00</b>	93,14	100%	100%	2.265.735
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	9.640.000	9.486.000,00	98.40	3 Dokumen	100%	154.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	23.403.605	21.291.870,00	90,98	6 Laporan	100%	2.111.735
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan layanan administrasi keuangan</b>	100%	3.146.055.876	<b>3.082.288.413,00</b>	97,97	100%	100%	63.767.463
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/Bulan	3.146.055.876	3.082.288.413,00	97,97	43 Orang/Bulan	91,48%	63.767.463
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan layanan administrasi kepegawaian</b>	100%	228.638.955	<b>226.099.297,00</b>	98,89	100%	100%	2.539.658
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	4 Paket	25.757.259	25.681.110,00	99,70	4 Paket	100%	76.149



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA

	Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	5.245.916	5.233.900,00	99,77	4 Paket	100%	12.016
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	885.780	798.000,00	90,09	4 Paket	100%	87.780
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	196.750.000	194.386.287,00	98,80	4 Laporan	100%	2.363.713
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b><i>Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur</i></b>	100%	34.202.864	<b>33.990.572,00</b>	99,38	100%	100%	212.292
Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	34.202.864	33.990.572,00	99,38	1 Unit	100%	212.292
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b><i>Jasa penunjang kinerja aparatur</i></b>	100%	2.202.649.264	<b>2.171.899.601,00</b>	98,60	100%	100%	30.749.663
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43.900.000	23.304.101,00	53,09	12 Laporan	100%	20.595.899
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	2.158.749.264	2.148.595.500,00	99,53	12 Laporan	100%	10.153.764



	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Barang milik daerah yang terpelihara</b>	100%	349.691.543	<b>304.222.877,00</b>	87	96%	96%	45.468.666
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	57.723.592	52.526.741,00	91	5 Unit	83,33%	5.196.851
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	9.252.516	9.181.550,00	99,23	12 Unit	100%	70.966
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 Unit	282.715.435	242.514.586,00	85,78	8 Unit	100%	40.200.849
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3</b>	88%	6.015.258.890	<b>5.970.346.830,00</b>	99,25	100%	113,63%	<b>44.912.060</b>
<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah / Kota</b>	<b>Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam kabupaten</b>	100%	5.818.246.788	<b>5.786.768.369,00</b>	99,46	100%	100%	31.478.419
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan , Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50 kasus	5.610.826.812	5.589.269.859,00	99,62	50 Kasus	100%	21.556.953



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA

Pengawasan	yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan							
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	1 Dokumen	126.992.197	123.169.764,00	97	1 Dokumen	100%	3.822.433
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan polisi Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	140 Orang	80.427.779	74.328.746,00	92,42	140 Orang	100%	6.099.033
<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota</b>	<b>Persentase Penegakan Perda</b>	100%	188.741.678	<b>176.491.961,00</b>	93,51	100%	100%	12.249.717
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi penegakan peraturan daerah kabupaten/ kota	4 Laporan	43.805.683	43.512.227,00	99,33	4 Laporan	100%	293.456
Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran	4 Laporan	144.935.995	132.979.734,00	91,75	4 Laporan	100%	11.956.261



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA

	Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP							
<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Pembinaan PPNS</b>	88%	8.270.424	<b>7.086.500,00</b>	85,69	88%	100%	1.183.924
Pengembangan kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	3 Laporan	8.270.424	7.086.500,00	85,69	3 Laporan	100%	1.183.924
<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>	100%	379.906.548	<b>350.837.004,00</b>	92,35	75%	75%	<b>29.069.544</b>
<b>Pencegahan, pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan pelayanan bencana kebakaran</b>	100%	329.906.548	<b>306.409.015,00</b>	92,88	50%	50%	23.497.533
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten /	56 Laporan	319.396.548	306.409.015,00	95,93	48 Laporan	85,71%	12.987.533



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA

	kota							
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	2 Orang	10.510.000	-	0	0 Orang	0	10.510.000
<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan kebakaran</b>	<b><i>Pemberdayaan masyarakat di kecamatan</i></b>	100%	50.000.000	<b>44.427.989,00</b>	88,86	100%	100%	5.572.011
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	52 Orang	50.000.000	44.427.989,00	88,86	52 Orang	100%	5.572.011

## BAB 4 PENUTUP

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun 2023 adalah “Sangat Tinggi”, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 1 Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Capaian Indikator	Realisasi Capaian Indikator	Tingkat Capaian	Kriteria
1.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Cakupan kinerja penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) penanganan kebakaran	20 Menit	21,7 Menit	91,15%	Sangat Tinggi
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
<b>Rata-Rata Capaian</b>			<b>98,52</b>			<b>Sangat Tinggi</b>

Dari data di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat indikator kinerja yang belum mampu mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu “Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran” yang hanya mampu memberikan pelayanan penyelamatan kebakaran dengan waktu tanggap (*response time*) 21,77 menit. Meskipun demikian rata-rata capaian kinerja dari sasaran strategis masuk dalam kriteria “Sangat tinggi”. Capaian kinerja ini merupakan hasil dari komitmen seluruh



aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba serta dukungan dari pihak-pihak lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam rangka memenuhi target, tujuan dan sasaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan sarana evaluasi atas kinerja institusi dalam mengupayakan perbaikan untuk kedepannya. Untuk itu perlu dilakukan beberapa langkah-langkah strategis antara lain :

- 1) Strategi realisasi perencanaan kinerja, diarahkan pada prioritas perencanaan kegiatan yang belum optimal pencapaiannya selama tahun 2023.
- 2) Strategi aparatur, diarahkan pada peningkatan kapabilitas aparatur, dan kualitas sumber daya manusia.
- 3) Strategi peningkatan sarana dan prasarana, diarahkan pada prioritas pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada secara rutin dan berkala.
- 4) Strategi penggunaan dana, diarahkan pada program prioritas agar menjadi lebih efektif dan efisien.

Balige, Februari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TOBA

**HARIANTO H. BUTAR BUTAR, S.E., M.Si**  
PEMBINA

NIP. 19780118 200502 1 001



# LAMPIRAN





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harianto H. Butarbutar, S.E., M.Si  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. Poltak Sitorus  
Jabatan : Bupati Toba

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balige, 2023

Pihak Kedua,  
  
IR. POLTAK SITORUS

Pihak Pertama,  
  
HARIANTO H. BUTARBUTAR, SE, M.Si  
PEMBINA  
NIP. 19780118 200502 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	88%
		Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	29%
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	88%
		Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
2.	Meningkatnyan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Penanganan Kebakaran	20 menit
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	6.697.862.753	DAU UMUM, DBH PROVINSI, PAD
2.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.979.782.495	DAU UMUM, DBH PROVINSI, DBH CHT, PAD, DBH, SILPA
3.	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran	370.606.548	DBH PROVINSI, PAD





## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harianto H. Butarbutar, S.E., M.Si  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. Poltak Sitorus  
Jabatan : Bupati Toba

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balige, 2023

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TOBA



HARIANTO H. BUTARBUTAR, SE., M.Si  
PEMBINA  
NIP. 19780118 200502 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	88%
		Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	29%
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	88%
		Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
2.	Meningkatnyan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Penanganan Kebakaran	20 menit
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	5.994.282.107	DAU UMUM, DBH PROVINSI, PAD
2.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.015.258.890	DAU UMUM, DBH PROVINSI, PAD, DBH, SILPA
3.	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran	379.906.548	DBH PROVINSI, PAD, DAU PENDIDIKAN



Balige, 2023  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TOBA

HARIANTO H. BUTARBUTAR, SE., M.Si  
PEMBINA  
NIP. 19780118 200502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Sutomo, Pagar Batu, Balige 22385 Sumatera Utara  
Email : satpolpp@tobakab.go.id

---

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TOBA  
NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan penerapan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dipandang perlu untuk membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba;
- b. bahwa guna kepentingan hal dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44614);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2016 Nomor 5);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2024;
  8. Peraturan Bupati Toba Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2024.

- Memperhatikan :
- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - c. Peraturan Bupati Toba Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan



Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

- d. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagai mana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Menyiapkan bahan dan data penyusunan dokumen SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba meliputi Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu, serta Evaluasi Kinerja;
  2. Menyusun dokumen pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  3. Melaporkan hasil pelaksanaan penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba;
- KETIGA : Menetapkan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik sebagai penanggungjawab pengumpulan data dan informasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam lingkup satuan kerja



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige  
Pada tanggal 26 Januari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TOBA**



**HARIANTO H. BUTARBUTAR, SE., M.Si**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19780118 200502 1 001**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati/Wakil Bupati Toba;
2. Inspektur Kabupaten Toba.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA  
NOMOR : 06 TAHUN 2024  
TANGGAL : 26 JANUARI 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
PENERAPAN SISTEM  
AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(SAKIP) SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TOBA  
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENERAPAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TOBA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1.	Penanggung jawab	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
2.	Ketua	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja	
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah 2. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 3. Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 5. Kasi Penyuluh, Pengawasan dan Pembinaan 6. Kasi Operasi dan Ketertiban Umum 7. Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat	

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN TOBA

  
HARIANTO H. BUTARBUTAR, SE., M.Si  
PEMBINA  
NIP. 19780118 200502 1 001

### LAMPIRAN GAMBAR

- o Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah



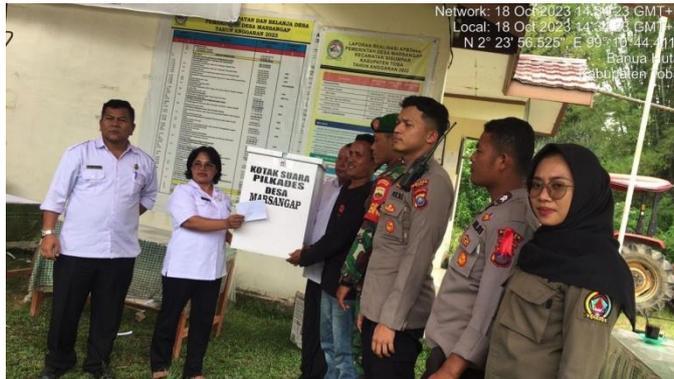


- o Kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) dan penyelesaian pelanggaran trantibum





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA



Network: 18 Oct 2023 14:23 GMT+7  
Local: 18 Oct 2023 14:23 GMT+7  
N 2° 23' 56.525", E 99° 10' 44.311"  
Banua Luta  
Kabupaten Toba



24 Des 2023 11:49:11

24 Des 2023 12:03:38  
17 Jalan Gereja  
Lumban Dolok Haume Bange  
Kecamatan Balige



No.18 Jalan Dokter Sutopo  
Singkil Maje  
Kecamatan Balige  
Kabupaten Toba  
Sumatera Utara

No.15 Jalan  
Kecamatan Balige  
Kabupaten Toba  
Sumatera Utara



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA



- o Kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan tingkat waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA

